



Parlementaria



3 Peningkatan Kapasitas Perempuan Lewat Beragam Pelatihan



4 Rencana Revisi UU MK Sudah Jalan Sejak Tahun Lalu



Singkong Dinilai Signifikan Entaskan Kemiskinan



Apresiasi Aksi Massa Jurnalis Tolak RUU Penyiaran



Terus Perjuangkan Tambahan Kuota Haji

Nomor 1296/II/VI/2024 Juni 2024



9 772614 339005



Terus Perjuangkan Tambahan Kuota Haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan DPR RI akan terus memperjuangkan penambahan kuota haji bagi jemaah Indonesia. Hal ini disampaikan Marwan saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Aceh, Rabu (29/5).

"Tahun ini kita berhasil menamban 20.000 kuota haji untuk jemaah calon haji Indonesia, tentu ini harus disyukuri dan harus terus ditingkatkan," ujar Marwan kepada **Parlementaria**. lebih lanjut Politisi Fraksi PKB ini juga memaparkan beberapa cara untuk meningkatkan tambahan kuota haji Indonesia.

"DPR akan merevisi Undang-Undang beberapa pasal yang bisa memungkinkan kita mengirimkan jemaah melalui negara sahabat yang berkenan ataupun terus berdiskusi dengan pemerintah Saudi untuk ditambah kuotanya," pungkas Marwan.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi melepas secara langsung 441 jemaah haji dari Kabupaten Gowa dan 9 petugas kloter, yang tergabung dalam kloter



Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi saat meninjau Embarkasi Makassar.

5 Embarkasi Makassar, Rabu (15/5). ia menitipkan pesan kepada jemaah untuk fokus ibadah selama di Tanah Suci, Arab Saudi.

"Kepada para jemaah, kami berpesan khusus agar fokus beribadah karena seluruh kebutuhan jemaah itu sudah terfasilitasi

melalui Kementerian Agama. Sehingga mereka tidak perlu berpikir lagi, makan kan tiga kali sehari disiapkan, hotel disiapkan, transportasi, sebelum mulai dari pesawat, shalawat itu disiapkan. Jadi mereka, pokoknya kita minta fokus beribadah. Tidak usah mikir yang lain," kata Kahfi.

Politisi Fraksi Partai PAN ini menambahkan, agar Jemaah haji tidak memforsir fisik hingga puncak pelaksanaan haji di Mekkah, Arab Saudi. "Kemudian, agar menghemat tenaga jangan terlalu memforsir. Kenapa? karena haji ini kan identik dengan ibadah fisik, sehingga mereka harus menjaga kondisi, menjaga Kesehatan. Karena puncak haji itu ialah wukuf di arafah, itu yang penting," tambahnya.

pdt,wil/aha





Biro Pemberitaan Parlemen

Peningkatan Kapasitas Perempuan Lewat Beragam Pelatihan



FOTO: IST/PDT

Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuat semacam tulisan dalam bahasa China ketika mengunjungi China Women's University (Universitas Perempuan China).

Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi upaya pemberdayaan perempuan lewat pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Hal tersebut diungkapkannya saat mengunjungi *China Women's University* (Universitas Perempuan China) dalam rangka kunjungan kerja di Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Peninjauan Puan bersama Delegasi DPR RI ke kampus yang juga dijadikan sebagai basis pelatihan pemberdayaan perempuan tersebut, sebagai langkah dukungan terhadap peningkatan kapasitas perempuan.

"Saya senang bisa hadir di kampus ini, melihat bagaimana upaya pemberdayaan bagi perempuan

lewat pendidikan dan pelatihan-pelatihan. Hal ini tentu dapat mendukung kemajuan kompetensi perempuan," kata Puan di *China Women's University*, Beijing, Rabu (29/5).

Pelatihan di kampus tersebut diharapkan dapat menyesuaikan program untuk negara-negara berkembang dengan fokus pada pembinaan kapasitas perempuan, kunjungan studi kelas atas, dan program pelatihan asing.

Lewat basis pelatihan ini juga diharapkan dapat tercipta *platform* untuk memberdayakan pertumbuhan perempuan, memajukan pemberdayaan perempuan, serta memfasilitasi pertukaran dan kerja sama di antara kaum perempuan.

ayu/aha



- PENGAWAS UMUM**
Pimpinan DPR RI
- KETUA PENGARAH**
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)
- WAKIL PENGARAH**
Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)
- PIMPINAN PELAKSANA**
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)
- PIMPINAN REDAKSI**
M. Ibrurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)
- WAKIL PIMPINAN REDAKSI**
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)
- REDAKTUR**
Agung Hidayat, S.I.P., Ridwan Budiman, S.I.P., Muhammad Husen
- REDAKTUR FOTO**
M. Andri Nurdiansyah
- SEKRETARIS REDAKSI**
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds
- ANGGOTA REDAKSI**
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setiantio, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maesyntaha, Anju Alfonso Sitompol, Zulfikar Mubien
- FOTOGRAFER**
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budlati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Geraldidi Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen
- ANALIS MEDIA**
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhani, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska
- INFOGRAFIS**
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri
- ADMINISTRASI**
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto
- PENERBITAN**
PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)
- PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)
- DESAIN GRAFIS**
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom
- IT MEDIA DIGITAL**
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.
- PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**
M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)
- KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**
Zulfikar, S.A.B.
- ADMINISTRASI**
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Khrisna Dwipa
- Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**

**HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Scan QR untuk berita selengkapnya

Rencana Revisi UU MK Sudah Jalan Sejak Tahun Lalu

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah Komisi III DPR RI menggelar rapat secara diam-diam saat membahas revisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Dasco memastikan tidak ada maksud atau rencana lain yang ingin dilakukan di balik rapat revisi UU MK.

"Tidak ada terkesan diam-diam karena pada saat reses kemarin kita mengadakan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam yang baru. Jadi sebenarnya tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada kemudian maksud-maksud lain," kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (20/5).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan bahwa revisi UU MK bahkan sudah mulai berjalan sejak tahun lalu, namun sempat terkendala karena pemilu. "Revisi Undang-Undang MK ini sudah dilaksanakan atau sudah dijalankan



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

sejak tahun lalu. Sejak Januari 2023 dan sudah dibahas sampai dengan pembahasan tingkat I antara pemerintah dan DPR pada 29 November 2023," ungkapnya.

Pembahasan ini juga sempat tertunda karena adanya surat keberatan yang diajukan eks Menteri

Koordinator Politik, Hukum dan Kea-manan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Waktu itu, Mahfud meminta DPR agar tidak segera mengesahkan UU MK. Namun dilanjutkan kembali setelah mendapat persetujuan Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto.

Dia juga memastikan, DPR tidak memiliki maksud lain dalam pembahasan revisi UU MK ini. Saat ditanya mengenai kapan revisi UU MK ini disahkan, Dasco menyebut tak bisa memastikan.

Saat ini, kata Dasco, DPR juga masih mengharmonisasi substansi revisi UU MK. Menurut dia, meski DPR dan pemerintah sudah sepakat, masih ada mekanisme yang harus dilalui. "Sehingga untuk waktu kita enggak bisa tentukan apakah kemudian itu diparipurnakan dalam waktu cepat atau lambat demikian," kata Dasco.

we/aha



TIDAK ADA TERKESAN DIAM-DIAM KARENA PADA SAAT RESES KEMARIN KITA MENGADAKAN RAPAT KOORDINASI DENGAN MENKO POLHUKAM YANG BARU. JADI SEBENARNYA TIDAK ADA YANG SEMBUNYI-SEMBUNYI, TIDAK ADA KEMUDIAN MAKSUD-MAKSUD LAIN.

Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku)



Scan QR untuk berita selengkapnyanya

Singkong Dinilai Signifikan Entaskan Kemiskinan

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmad Gobel menilai komoditas pangan singkong memiliki nilai yang signifikan. Menurutnya singkong ini tak hanya dapat menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia melainkan juga dapat membantu meringankan kemiskinan.

Hal ini disampaikannya saat mengunjungi pabrik pembuatan tepung singkong atau tapioka bermerek Gunung Pelawan, produksi PT Langit Bumi Lestari, di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (22/5).

“Kita harus terus mengembangkan keragaman bahan pangan, salah satunya singkong dan tepung singkong. Pertanian dan industri pangan bukan saja penting bagi ketahanan dan kedaulatan pangan, tapi juga sangat signifikan dalam membuka lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan serta membangun kesejahteraan masyarakat,” ungkap



FOTO: IST/PDT

Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel, saat mengunjungi pabrik pembuatan tepung singkong atau tapioka di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Kamis (22/5/2024).

Gobel dalam keterangan tertulis kepada **Parlementaria**, di Jakarta, Sabtu (25/5).

Gobel mengatakan, banyak orang tidak menyadari bahwa tepung singkong dan modifikasi tepung

singkong merupakan bahan sangat penting dalam berbagai produk makanan seperti bakso, nuget, mi, dan beragam produk makanan lainnya. “Karena itu tanpa terasa kita menjadi importir besar untuk tepung singkong,” katanya.

Pada sisi lain, ada banyak negara yang merupakan nett importir atau importir besar tepung singkong seperti Jepang, Filipina, China, dan lain-lain. Tepung singkong juga bisa menjadi bahan kertas, plastik organik, sedotan, dan beragam wadah.

“Jadi selain untuk ketahanan pangan nasional, singkong juga bisa menjadi penghasil devisa,” sebut Gobel. Membangun pertanian pangan, kata Gobel, juga bagian dari pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang besar, dan membangun kesejahteraan masyarakat.

rdn

KITA HARUS TERUS MENGEMBANGKAN KERAGAMAN BAHAN PANGAN, SALAH SATUNYA SINGKONG DAN TEPUNG SINGKONG. PERTANIAN DAN INDUSTRI PANGAN BUKAN SAJA PENTING BAGI KETAHANAN DAN KEDAULATAN PANGAN, TAPI JUGA SANGAT SIGNIFIKAN DALAM MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN PENGENTASAN KEMISKINAN SERTA MEMBANGUN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

Rachmad Gobel

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Apresiasi Aksi Massa Jurnalis Tolak RUU Penyiaran

Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa terkait dengan Revisi Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5) siang. Massa aksi tersebut diketahui tergabung dari beberapa aliansi jurnalis dan serikat pekerja media. Di tengah aksi massa tersebut, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengapresiasi aksi jurnalis tersebut.

“Terima kasih atas unjuk rasa yang disampaikan aliansi jurnalis, pers mahasiswa dan organisasi pro demokrasi. Ini salah satu upaya kita untuk tetap menjaga semangat demokrasi, yang salah satu pilar utamanya adalah kebebasan berpendapat,” kata Farhan yang langsung menghampiri dan berada di tengah-tengah jurnalis, di depan Gedung DPR/MPR, RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5).

Dalam kesempatan itu, ia menilai revisi UU Penyiaran bisa jadi pintu masuk bagi aturan-aturan yang tidak sesuai dengan kebebasan pers. Oleh karena itu, Farhan bertekad bakal mengawal perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran



Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan, saat menemui massa aksi tergabung dari beberapa aliansi jurnalis dan serikat pekerja media di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

itu yang saat ini sedang dibahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

“Kita sedang memperjuangkan bagaimana caranya pasal-pasal yang mengganggu kebebasan berpendapat *nggak* masuk. Saat ini prosesnya masih di Badan Legislasi, yang akan menentukan

apakah boleh dibahas di periode sekarang, yang akan berakhir Agustus, atau dilanjutkan di DPR periode mendatang,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Diketahui pada aksi ini, terdapat tiga tuntutan yang disuarakan jurnalis. Tuntutan tersebut yaitu pertama, batalkan seluruh pasal bermasalah dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Kedua, Libatkan partisipasi Dewan Pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro-demokrasi secara aktif dan bermakna dalam pembahasan revisi UU Penyiaran. Ketiga, pastikan perlindungan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam setiap peraturan perundang-undangan.

hal/rdn

KITA SEDANG MEMPERJUANGKAN BAGAIMANA CARANYA PASAL-PASAL YANG MENGGANGGU KEBEBASAN BERPENDAPAT *NGGAK* MASUK. SAAT INI PROSESNYA MASIH DI BADAN LEGISLASI, YANG AKAN MENENTUKAN APAKAH BOLEH DIBAHAS DI PERIODE SEKARANG, YANG AKAN BERAKHIR AGUSTUS, ATAU DILANJUTKAN DI DPR PERIODE MENDATANG.

Muhammad Farhan

Anggota Komisi I DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Segera Dilakukan

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa DPR RI akan segera meratifikasi kerja sama pertahanan dengan empat negara, yakni Brasil, Prancis, Kamboja dan Uni Emirat Arab. Keputusan itu diambil usai Komisi I menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal dari beberapa kementerian terkait, yaitu Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

“Memberikan masukan-masukan tentang rencana DPR atau Komisi I yang akan meratifikasi kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Brasil, Indonesia dengan Prancis, Indonesia dengan Kamboja dan Indonesia dengan Uni Emirat Arab,” ujar Hasanuddin kepada **Parlementaria** usai RDP dengan Pemerintah membahas RUU terkait kerja sama bidang pertahanan di Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5).

“Masukan-masukannya cukup positif dan dalam waktu dekat kami akan segera Komisi I melaksanakan ratifikasi,” lanjutnya.



Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, saat diwawancarai Parlementaria usai RDP dengan Pemerintah membahas RUU terkait kerja sama bidang pertahanan di Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Melalui ratifikasi, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan DPR mendorong pemerintah Indonesia meningkatkan kerja sama pertahanan dengan empat negara tersebut, khususnya di bidang produksi industri pertahanan. Terlebih, ia menilai

keempat negara itu memiliki kemampuan yang baik untuk bekerja sama dengan Indonesia.

Dia mengatakan sebelumnya Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah negara itu sejak lama, salah satunya dengan Brasil dalam pengadaan pesawat Super Tucano.

“Kalau ada payung hukum saya kira akan lebih bagus lagi ya. Karena sebelumnya hanya kerja sama misalnya Menhan (Menteri Pertahanan) Indonesia dengan Menhan negara tersebut. Kalau sekarang adalah pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tersebut. Jadi lebih luas,” jelas pria yang berpangkat terakhir sebagai Mayor Jenderal TNI AD tersebut.

hal/rdn

KALAU ADA PAYUNG HUKUM SAYA KIRA AKAN LEBIH BAGUS LAGI YA. KARENA SEBELUMNYA HANYA KERJA SAMA MISALNYA MENHAN (MENTERI PERTAHANAN) INDONESIA DENGAN MENHAN NEGARA TERSEBUT. KALAU SEKARANG ADALAH PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PEMERINTAH NEGARA TERSEBUT. JADI LEBIH LUAS.

TB Hasanuddin

Anggota Komisi I DPR RI

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Penentuan Batas Wilayah Harus Berorientasi pada Rakyat

Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan meminta agar para pimpinan daerah bijak dalam menentukan batas-batas wilayahnya dan selalu berorientasikan pelayanan rakyat dalam bertugas. Menurut Ongku, saat pembahasan RUU 27 R UU Kabupaten/Kota inilah, momen yang paling tepat untuk memperjelas terkait batas-batas wilayah tersebut.

"Kita harus ada *wisdom* di antara para pimpinan daerah ini. Mau kemanapun itu tentunya orientasi kita yang paling utama itu kan melayani masyarakat kita," kata Ongku dalam RDPU Panja 27 R UU dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Bangka Belitung di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, saat ini memang tengah marak sengketa batas antar kabupaten/kota. Bahkan di dalam kabupaten-kota pun banyak terjadi masalah batas desa atau batas kecamatan yang belum beres.

"Sebetulnya ini aturan mainnya



Anggota Komisi II DPR RI Ongku P. Hasibuan, saat mengikuti RDPU Panja 27 R UU dengan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Bangka Belitung, Senin (20/5/2024).

kan sudah jelas ya. Kalau batas kabupaten/kota itu harusnya bisa diselesaikan di tingkat provinsi. Saya sudah pernah bicara dengan Pak Menteri Dalam Negeri soal tersebut. Karena kebetulan di daerah-daerah pemilihan saya waktu itu juga ada terjadi kasus seperti ini. Jadi fasilitasnya itu dilakukan oleh

gubernur. Tentu harus dengan kesepakatan para ketua DPRD dan juga bupati masing-masing," sambungnya.

Maka, Legislator Dapil Sumatera Utara II ini juga berharap terjadi sinkronisasi yang baik antara pemerintah Kabupaten Belitong dan Kabupaten Belitong Timur terkait batas wilayah, yang sebelumnya sempat ada masalah terkait batas wilayah.

"Apalagi tadi saya dengar misalnya kayak Belitong Timur tadi. Saya dengar cerita bahwa ada daerah yang *de facto* kelihatannya lebih pantas untuk menjadi Kabupaten Belitong. Tapi *de jure*, di dalam undang-undang dia disebutkan masuk ke dalam Kabupaten Belitong Timur. Sehingga seolah-olah mereka tidak terurus. Ini juga harus diselesaikan menurut saya," pungkasnya.

we/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Optimistis Kepolisian Atasi Masalah Kamtibmas Jelang PON XXI

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil optimistis bahwa kepolisian mampu mengatasi dan mencegah potensi-potensi yang mengganggu jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI yang akan berlangsung pada September 2024 mendatang. Terlebih, ia menilai agenda yang berlangsung tersebut adalah agenda berskala nasional.

“Polisi kita adalah polisi nasional juga ya. Karena itu kami percaya dan mendorong terutama bagaimana kemudian anggaran pelaksanaan PON tersebut sebagaimana kebutuhan kebutuhan aparat keamanan, baik sarana dan prasarana maupun juga keuangan. Hal itu agar mereka bisa optimal mengawal pelaksanaan pon di Aceh dan Sumatera Utara,” ujar Nasir kepada **Parlementaria** usai pertemuan dengan Polda Aceh dan Kanwil Kumham Aceh dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Banda Aceh, Aceh, Jumat (31/5).

Ia mengungkapkan, kendala yang dimiliki kepolisian sendiri mengenai



FOTO: HAL/PUT

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil saat mengikuti pertemuan dengan Polda Aceh dan Kanwil Kumham Aceh dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI di Banda Aceh, Aceh, Jumat (31/5/2024).

persiapan pengamanan PON itu yakni terkait anggaran juga sarana-prasarana. Ia mengungkapkan nantinya hasil dari kunjungan kerja spesifik tersebut akan ditindaklanjuti dalam rapat di DPR, sehingga agenda PON mendatang berjalan lancar.

“Ya nanti kami sampaikan kepada Kapolri atau Wakapolri agar

bisa dipenuhi karena PON ini akan berlangsung di bulan sembilan (September) yang akan datang,” ujar Politisi Fraksi PKS dari Dapil Aceh ini.

Diketahui, September mendatang Indonesia akan menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI. Kegiatan yang direncanakan mulai pada tanggal 8 September 2024 tersebut, membuka kompetisi olahraga yang terdiri dari 33 cabang olahraga, 42 disiplin cabang olahraga, dengan total 510 nomor pertandingan akan dilaksanakan di wilayah Provinsi Aceh. Acara tersebut diperkirakan akan diikuti oleh 5.636 atlet dan 2.572 ofisial, dan pembukaan PON XXI sendiri akan digelar di Komplek Olahraga Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. **hal/rdn**

“**YA NANTI KAMI SAMPAIKAN KEPADA KAPOLRI ATAU WAKAPOLRI AGAR BISA DIPENUHI KARENA PON INI AKAN BERLANGSUNG DI BULAN SEMBILAN (SEPTEMBER) YANG AKAN DATANG.**”

Nasir Djamil

Anggota Komisi III DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tinjau Tol Bocimi, Harus Ada Audit Konstruksi

Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mengatakan harus ada audit konstruksi di wilayah Cianjur. Hal ini ia sampaikan usai meninjau Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) bersama Bina Marga.

“Harus ada audit konstruksi di wilayah sekitar cianjur terutama cianjurnya, nah ini kan tidak jauh, tidak lama kemudian kan terjadi longsor jembatan cikeretek, jalan cikeretek, kemudian dilakukan revitalisasi, nah itu sudah selesai kemudian terjadi disini,” ujar Mulyadi usai pertemuan dengan Bina Marga di Toll Bocimi KM 64 (23/5).

Mulyadi menyayangkan bahwa saat Tim Kunspek Komisi V DPR RI saat tiba di lokasi, Bina Marga masih melayangkan 2 opsi untuk Perbaikan Toll Bocimi. “Kami malah kaget, ternyata disodorkannya malah ma-sih 2 opsi penyelesaian, saya pikir saya hadir dan rekan-rekan hadir itu untuk kapan ini



Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi, saat pertemuan dengan Bina Marga di Toll Bocimi KM 64 (23/5/2024).

diselesaikan,” ujar Mulyadi.

Jalan Tol Bocimi ditargetkan akan selesai perbaikan pada saat

libur natal. Mulyadi pun berharap negara akan mengedepankan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

“Nah ini negara dalam tanda petik betul-betul harus fokus ya, terutama dalam kementerian pupr dalam hal ini dirjen bina marga untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan baik dan saya berharap kalau pun ada kerusakan-kerusakan begini tidak boleh lambat begitu untuk segera memutuskan,” ujar Mulyadi.

Mulyadi berharap apapun yang terjadi, opsi tersebut harus yang terbaik. Jangan sampai hal ini terjadi di kemudian hari dan karakter alam akan sangat berpengaruh dalam pembangunan ini. **eno/aha**



NAH INI NEGARA DALAM TANDA PETIK BETUL-BETUL HARUS FOKUS YA, TERUTAMA DALAM KEMENTERIAN PUPR DALAM HAL INI DIRJEN BINA MARGA UNTUK MEMASTIKAN BAHWA SEMUA BERJALAN DENGAN BAIK DAN SAYA BERHARAP KALAU PUN ADA KERUSAKAN-KERUSAKAN BEGINI TIDAK BOLEH LAMBAT BEGITU UNTUK SEGERA MEMUTUSKAN.

Mulyadi

Anggota Komisi V DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Investigasi Kebakaran *Smelter* Nikel di Kalimantan



FOTO: JKAPDOT

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyrul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Anggota Komisi VII DPR RI Nasyrul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik *smelter* nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik *smelter* PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan

Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5).

Politisi F-PDI Perjuangan itu menilai, hasil dari temuan di lapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak

terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap *smelter* itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini *Insya Allah* tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyrul.

Smelter tersebut harus segera diperbaiki. Sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya *smelter* tidak ditemukan alat pemadam kebakaran. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehingga tidak layak. **jka/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya





Potensi Bahaya

STARLINK GUNAKAN IP GLOBAL



Starlink resmi beroperasi di Indonesia, data DownDetector sebut satelit orbit rendah (LEO) milik Elon Musk masih gunakan IP global.

Hal ini berpotensi membahayakan data pribadi masyarakat dan kedaulatan negara.

Jika tidak gunakan IP lokal maka jaringannya akan langsung tersambung ke Starlink di AS dan pemerintah Indonesia tidak memiliki kontrol atas mereka.

Internet Protocol (IP): serangkaian angka yang jadi identitas perangkat yang terhubung dengan jaringan.

IP Global bisa picu perjudian online makin menjamur. Ini karena IP-nya tak dikontrol di Indonesia.



Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Kemenkominfo untuk membahas lebih lanjut mengenai operasional Starlink di Indonesia. Hal ini dilakukan guna merespon berbagai kekhawatiran di masyarakat dengan adanya perusahaan yang dijalankan Elon Musk ini. "Meski Starlink masuk ke Indonesia, perusahaan jasa internet tersebut berkewajiban menggunakan gateway Indonesia dan gateway tersebut di dalamnya sudah terdapat instrumen negara yang mengawasi"

Tingkatkan Produktivitas dan Perbesar Anggaran Riset

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati angkat bicara terkait penyusunan UU APBN 2025, setelah pemerintah mematok angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1 - 5,5 persen pada KEM-PPKF 2025. Menurutnya, syarat menuju Indonesia Emas 2045 dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah diperlukan pertumbuhan ekonomi setidaknya 6 persen.

“Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi per tahun antara 6-7 persen, sementara tren pertumbuhan ekonomi selama dua periode kepemimpinan saat ini (hanya) mencapai rata-rata 5 persen saja,” kata Anis dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (30/5).

Anis menengarai pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut, didorong oleh rendahnya tingkat produktivitas Indonesia. Rata rata produktivitas yang rendah tercermin dari *Total Factor Productivity* (TFP) Indonesia selama 2005 – 2019 yang tumbuh negatif sebesar -0,66.



FOTO: MUN/PDT

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati.

“Produktivitas yang rendah dari Indonesia disebabkan kualitas SDM yang tertinggal,” ungkapnya.

Tambahnya, kapasitas ilmu

pengetahuan, teknologi, dan inovasi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui efisiensi, desain produk berkualitas, dan berteknologi tinggi.

“Namun semua itu dihadapkan dengan lemahnya komitmen pemerintah terutama dari sisi belanja anggaran riset dan teknologi yang baru mencapai 0,28 persen dari PDB. Jauh tertinggal dibandingkan Korea Selatan (4,81), dan Malaysia (1,04) menurut data tahun 2020,” katanya.

Penguatan belanja anggaran riset Pemerintah menjadi penting untuk memicu lahirnya riset, inovasi, dan teknologi. Sehingga, akan mendorong tingkat produktivitas Indonesia dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. uc/rdn



PRODUKTIVITAS YANG RENDAH DARI INDONESIA DISEBABKAN KUALITAS SDM YANG TERTINGGAL. BAIK DARI SISI PRODUKTIVITAS SEKTOR EKONOMI YANG RENDAH, KAPASITAS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, INOVASI YANG TERTINGGAL, HINGGA RUMITNYA REGULASI DAN KEPASTIAN HUKUM, INDONESIA KESULITAN MENUJU NEGARA MAJU.

Anis Byarwati

Anggota Komisi XI DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



RUU Komoditas Strategis Hapus Stigma Negatif Tembakau

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengusulkan agar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis menekankan RUU ini harus bebas dari stigma negatif bahwa komoditas strategis, salah satunya tembakau, merusak kehidupan bangsa.

"Kita perlu perluas (serap aspirasi RUU ini) dengan mengundang para akademisi, kalau perlu ahli dan aktivis kesehatan pun kita undang. Jika (pembatasan) tidak diatur, yang disalahkan hanya karena tembakau saja. Itu tidak adil. Ingat, kita juga perlu mensejahterakan para petani. Jadi, justru jangan dimatikan nasib mereka," tuturnya dalam RDPD Baleg DPR RI dengan Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/5)

Perlu diketahui, tembakau dinilai sebagai komoditas strategis yang dimiliki oleh Indonesia. Pasaunya,



Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo saat mengikuti RDPD Baleg DPR RI dengan Paguyuban Pelopor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura (P4TM) dan Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia (APCI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Indonesia merupakan negara penghasil tembakau terbesar keenam setelah Cina, Brazil, India, USA dan Malawi. Pada tahun 2023, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS),

volume produksi tembakau bisa mencapai 238,8 ribu ton.

Di sisi lain, nasib petani tembakau dihadapkan dengan ketidakpastian. Kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi terkini membuat hasil produksi tembakau tidak memiliki nilai tawar. Petani berangsur mengalami penurunan nilai pendapatan. Padahal, biaya pengelolaan, pembelian pupuk dan obat terus membengkak.

"Ini kan masalah serius. Harapan kami, saya rasa RUU (Komoditas Strategis) ini merupakan media yang sangat strategis, yang melindungi petani dan menjaga keberlanjutan dari devisa negara, (yang berasal) dari komoditas strategis yang dipunyai Indonesia," tandasnya. [um/rdn](https://www.um/rdn)

INI KAN MASALAH SERIUS. HARAPAN KAMI, SAYA RASA RUU (KOMODITAS STRATEGIS) INI MERUPAKAN MEDIA YANG SANGAT STRATEGIS, YANG MELINDUNGI PETANI DAN MENJAGA KEBERLANJUTAN DARI DEvisa NEGARA, (YANG BERASAL) DARI KOMODITAS STRATEGIS YANG DIPUNYAI INDONESIA.

Firman Soebagyo

Anggota Baleg DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Urgensi Lembaga Independen Dukung Fungsi Anggaran Parlemen

Wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said memimpin kunjungan kerja Banggar ke *Congressional Budget Office* (CBO) di Washington D.C. Amerika Serikat (AS). Ia menyebutkan, peran CBO sangat penting dalam membantu kongres AS membuat kebijakan penganggaran yang akurat.

"Hal ini selayaknya diadopsi oleh parlemen di Indonesia, sehingga Fungsi anggaran Parlemen Indonesia khususnya di Banggar berperan sebagai pemegang amanah rakyat (*social trustee*) dapat membuat kebijakan yang akurat," ujarnya dalam pernyataan resminya, Minggu [26/5].

Politisi Partai Golkar ini melanjutkan, fungsi anggaran yang berprioritas pada kesejahteraan rakyat menunjukkan keberpihakan DPR terhadap rakyat. Dimana parlemen turut menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu Wakil Ketua Banggar Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan akurasi hasil perkiraan anggaran yang dihasilkan CBO dibandingkan dengan anggaran yang diajukan Presiden AS serta realisasi anggarannya tidak mungkin didapat tanpa mempekerjakan ahli diberbagai bidang.

Delegasi yang ikut kunjungan, Anggota Banggar DPR RI Ratna Juwita Sari mengatakan tantangan yang besar bagi CBO sebagai lembaga non partisan dalam menjaga independensi



Wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhammad Said (kiri) saat memimpin kunjungan kerja Banggar ke Congressional Budget Office (CBO) di Washington D.C. Amerika Serikat (AS).

analisis yang dilakukan, khususnya dari partai yang berkuasa. Mengatasi tantangan ini CBO melakukan strategi dengan mempublikasikan data-data atau informasi secara transparan kepada masyarakat umum.

"Jadi jika kongres membuat kebijakan yang mungkin keliru maka masyarakat umum bisa mendesak kongres dalam membuat kebijakan yang lebih tepat sesuai dengan data-data obyektif yang masyarakat umum bisa lihat dalam publikasi CBO," kata Politisi Fraksi PKB tersebut.

Turut serta menjadi delegasi, Anggota Banggar DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan legislator di senayan sebagai wakil rakyat akan lebih memahami apa saja yang dibutuhkan oleh rakyat daerah pemilihannya. "Sehingga perlu

pengalokasian khusus anggaran/dana aspirasi yang bisa diajukan anggota DPR RI terkait dengan kebutuhan konstituennya," sahutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Mark Hadley, COO CBO, bahwa anggota parlemen lebih memahami kebutuhan konstituennya sehingga wajar jika anggota parlemen dalam mengajukan anggaran/dana aspirasi. Pada awal pertemuan, ia bilang, CBO merupakan lembaga non-partisan yang beroperasi sejak tahun 1975.

CBO merupakan lembaga yang memberikan informasi obyektif dan tidak memihak untuk mendukung proses pembahasan anggaran federal. Misi CBO adalah membantu kongres dalam membuat kebijakan anggaran dan ekonomi yang efektif.

aha



Scan QR untuk berita selengkapnya

Diharapkan Mampu Beri Layanan Prima

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso berharap RS Mitra Medika Pontianak dapat terus berkembang dalam memberikan pelayanan yang prima. Bentuknya ialah fasilitas yang lengkap bagi peserta Jamkestama VVIP, serta dapat menjadi Rumah Sakit rujukan yang baik bagi masyarakat Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada umumnya.

"Kami melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak. Ini adalah kunjungan kerja kami yang kedua kesini, yang pertama kami datang pada tahun 2014 yang lalu. Pada saat itu masih baru, karena lahirnya tahun 2014 dan sekarang sudah berusia sepuluh tahun, tentunya banyak penambahan-penambahan fasilitas yang ada di rumah sakit ini," ucap Agung di Pontianak, Kalbar, Rabu (29/5).

Ia berharap, Rumah Sakit Mitra Medika Pontianak ini bisa



Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso saat meninjau fasilitas serta pelayanan di RS Mitra Medika Pontianak, Kalbar, Rabu (29/5/2024).

terus berkembang dan mampu memberikan pelayanan yang lebih

prima dengan alat yang lebih lengkap lagi, agar Rumah Sakit tersebut bisa menjadi rujukan utama bagi peserta Jamkestama VVIP pada khususnya, dan untuk masyarakat di Pontianak dan Kalimantan Barat pada umumnya.

"Sehingga masyarakat Kalimantan Barat tidak perlu lagi berobat ke negara tetangga. Cukup di Pontianak ini ada Rumah Sakit yang luar biasa dan hebat. Saya kira dari pihak rumah sakit sudah mengerti betul apa yang menjadi SOP daripada pelayanan pemegang kartu Jamkestama VVIP. Tadi kita juga sudah berkomunikasi secara langsung dengan pihak rumah sakit dan mereka sudah sangat mengerti sehingga tidak ada lagi persoalan," pungkasnya. **dep/aha**



SEHINGGA MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT TIDAK PERLU LAGI BEROBAT KE NEGARA TETANGGA. CUKUP DI PONTIANAK INI ADA RUMAH SAKIT YANG LUAR BIASA DAN HEBAT.

Agung Budi Santoso

Ketua BURT DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya

Puji Langkah Negara Barat Akui Kedaulatan Palestina

Negara Eropa seperti Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, Selasa (28/5), secara resmi mengakui negara Palestina. Kini tercatat total 146 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina. Menyoroti perkembangan isu Palestina, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memuji langkah ketiga negara Barat tersebut.

"Apresiasi dan dukungan untuk ketiganya, khususnya bagi Kerajaan Spanyol dan Irlandia sebagai negara terbesar dan paling berpengaruh secara politik di Uni Eropa. Dan tentu Norwegia yang merupakan negara damai dan pro perdamaian di Skandinavia," papar Fadli dalam keterangannya kepada **Parlementaria**, Rabu (29/5).

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu mengharapkan negara-negara lain agar segera mengikuti langkah ketiga negara Benua Biru tersebut. "Bagi negara



FOTO: GER/PDT

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon.

yang belum mengakui Palestina, ini waktu yang tepat untuk melakukannya.

Kami mengapresiasi Slovenia, Malta, dan Perancis yang telah memberikan sinyal positif," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI ini juga mendorong Pemerintah Indonesia memainkan peran sentral di ASEAN terkait Palestina. "Ada dua negara ASEAN yaitu Singapura dan Myanmar yang belum mengakui Palestina. Dalam konteks ini, kita diharapkan dapat memainkan peran kontributifnya," imbuhnya.

Lebih jauh, dalam pandangan Fadli, peningkatan pengakuan bagi Palestina, khususnya dari negara-negara Barat, tak sekadar desakan urgensi realisasi perdamaian dan solusi dua negara, tapi juga ekspresi kemarahan terhadap kebiadaban Israel. **ssb/aha**



APRESIASI DAN DUKUNGAN UNTUK KETIGANYA, KHUSUSNYA BAGI KERAJAAN SPANYOL DAN IRLANDIA SEBAGAI NEGARA TERBESAR DAN PALING BERPENGARUH SECARA POLITIK DI UNI EROPA. DAN TENTU NORWEGIA YANG MERUPAKAN NEGARA DAMAI DAN PRO PERDAMAIAN DI SKANDINAVIA.

Fadli Zon

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Komitmen Indonesia-Norwegia, Teguhkan Perdamaian Global

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana dan Sukamta menerima kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Mrs. Rut Kruger Giverin di ruang tamu Dubes Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5).

Dalam pertemuan ini BKSAP menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Norwegia untuk memajukan perdamaian di Timur Tengah, termasuk pengakuan terhadap Negara Palestina. Fadli menyampaikan, pengakuan Norwegia terhadap Negara Palestina yang akan diberlakukan pada hari ini tanggal 28 Mei memberikan harapan baru bagi masyarakat Palestina bahwa masih ada masyarakat di wilayah utara yang terus peduli terhadap perjuangan mereka.



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana dan Sukamta saat menerima kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Mrs. Rut Kruger Giverin di ruang tamu Dubes Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Hal ini juga merupakan bukti komitmen Norwegia terhadap perdamaian di Timur Tengah yang telah lama ditunjukkan, termasuk dalam

memediasi negosiasi perdamaian antara Palestina dan Israel melalui Perjanjian Oslo. "Komitmen Indonesia dan Norwegia terhadap perdamaian global tetap teguh. Tak terkecuali dalam tragedi genosida yang terjadi di Gaza, Palestina saat ini," papar Fadli.

Menurutnya apa yang terjadi di Gaza adalah bencana besar, sebuah konflik yang melampaui skala logika kemanusiaan. Dunia melihat anak-anak dan perempuan, warga sipil tak berdosa, terkubur dan mati syahid di reruntuhan, bertahan hidup tanpa kebutuhan dasar, dan diperlakukan dengan cara yang begitu rendah oleh militer Israel.

"Saya berterima kasih kepada Norwegia karena tetap berkomitmen mendukung tujuan kemanusiaan dalam konflik ini dan terus mendanai UNRWA, jantung bantuan kemanusiaan untuk Palestina," ungkap Fadli.

ssb/aha

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Tindaklanjuti Kasus Pemalsuan Pelat DPR RI

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin meminta Polda Metro Jaya untuk tindaklanjuti penyelidikan terhadap kasus pemalsuan pelat DPR RI. Hal itu menyusul perkembangan terbaru bahwa Polda Metro Jaya kembali menangkap beberapa orang pelaku, dimana salah satunya melakukan pemalsuan enam pelat DPR RI secara sekaligus. Tak hanya pelat dinas, oknum tersebut juga memalsukan Kartu Tanda Anggota (KTA) DPR.

“Pemalsuan enam pelat DPR RI ini sekaligus kan luar biasa. Jadi, harapan kami kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap tersangka sehingga kita bisa mengetahui tujuan motif tersangka tersebut,” ujar Imron Amin dalam keterangan video yang diterima **Parlementaria**, di Jakarta, Jumat (31/5).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap agar ke depannya terkait kasus pemalsuan ini agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. “Termasuk, apabila ada oknum anggota DPR RI



FOTO: ISTIPOT

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin.

yang terlibat agar dilaporkan kepada MKD dan akan kami tindaklanjuti untuk dilakukan penyelidikan terhadap oknum tersebut,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, Polda Metro Jaya telah menangkap lima

orang terkait pemalsuan pelat dinas khusus DPR dan KTA. Kelimanya itu antara lain berinisial RH, A, AW, MTH, dan MIM. “Jadi *update*-nya adalah penambahan tersangka yang ditahan, dari lima orang menjadi enam orang,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Jumat (31/5).

Dua di antaranya berinisial HI sebagai pengguna pelat palsu, sedangkan empat lainnya merupakan pembuat. “Tersangka RH adalah pengguna pelat, STNK, dan *ID card* palsu, sejumlah enam pelat. Kemudian, tersangka A adalah perantara pembuat pelat, STNK, dan pelat palsu,” terang Ade Ary. **tn/rdn**

PEMALSUAN ENAM PELAT DPR RI INI SEKALIGUS KAN LUAR BIASA. JADI, HARAPAN KAMI KEPADA KEPOLISIAN UNTUK MELAKUKAN PENYELIDIKAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP TERSANGKA SEHINGGA KITA BISA MENGETAHUI TUJUAN MOTIF TERSANGKA TERSEBUT.

Imron Amin

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Cerminan Setjen DPR Maknai Nilai Pancasila

Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 juni 2024 diperingati oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dengan melakukan upacara. Peringatan tahun ini mengusung tema 'Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas Tahun 2045'.

Deputi Bidang Persidangan Suprihartini menekankan mengenai pentingnya penerapan nilai Ber-AKHLAK Kolaboratif sebagai cerminan daripada nilai Pancasila sila ke-3 yakni Persatuan Indonesia dalam kerja Setjen DPR RI dalam mendukung kinerja DPR RI.

"Sebagaimana kita ketahui kan ASN kita ASN Ber-AKHLAK, itu merupakan satu kolaborasi bagi kita semua bagaimana penerapan Ber-AKHLAK dan juga penerapan nilai-nilai Pancasila itu kita semua ketahui memang menjadi satu pedoman bagi kita dalam menjalankan kehidupan



Deputi Bidang Persidangan Suprihartini saat mengikuti upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di lingkungan Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/6/2024).

kita sehari-hari," ujarnya kepada **Parlementaria** se usai mengikuti upacara di lingkungan Komplek

Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (1/6).

Tambahnya, makna persatuan dalam sila ke-3 Pancasila yakni Persatuan Indonesia patut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari pegawai Setjen DPR RI. Karena sebagai ASN yang bekerja dalam lingkungan politik, sila ini memaknai bagaimana sebagai bangsa Indonesia yang baik harus bersatu dalam menghadapi segala dinamika perkembangan politik yang ada.

"Jadi kita berharap dengan memaknai kembali akan arti penting persatuan dan kesatuan itu khususnya di Sekretariat Jenderal DPR RI untuk kita terus bersatu dalam memberikan dukungan dan kinerja kita bagi peningkatan performa dari parlemen Indonesia itu sendiri," jelasnya. **gal/aha**



JADI KITA BERHARAP DENGAN MEMAKNAI KEMBALI AKAN ARTI PENTING PERSATUAN DAN KESATUAN ITU KHUSUSNYA DI SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI UNTUK KITA TERUS BERSATU DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN DAN KINERJA KITA BAGI PENINGKATAN PERFORMA DARI PARLEMEN INDONESIA ITU SENDIRI.

Suprihartini

Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Sri Rahayu: Pentingnya Mahasiswa Berorganisasi



FOTO: AFR/PDI

Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu dalam foto bersama usai menerima peserta magang Kampus Merdeka di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Generasimuda, khususnya mahasiswa, merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan. Oleh karena itu, Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu berpesan agar segenap mahasiswa dan mahasiswi Indonesia, khususnya peserta magang Kampus Merdeka terus mengasah keterampilan dengan berorganisasi. Tujuannya

selain menambah pengalaman, juga memperkaya pemikiran khususnya bagi yang ingin berkarier di dunia politik, sebagaimana pengalaman hidupnya.

“Dengan saya masuk dunia organisasi kemahasiswaan, itulah yang menjadi bekal awal dalam karier politik saya. Oleh karena itu, kalian semua harus ikut di dalam organisasi yang akan menunjang

yang akan memberikan dampak positif terutama di dalam pemikiran dan gerakan kalian kedepannya,” pesan Sri Rahayu di hadapan peserta magang Kampus Merdeka di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/5).

Diceritakannya, sebelum berhasil seperti hari ini, ia terlebih dulu memacu diri untuk aktif bergelut di berbagai organisasi kemahasiswaan seperti Gerakan Nasional Mahasiswa Indonesia (GMNI) hingga partai politik. Di gerakan itu, karakter dan jiwa kepemimpinan Sri Rahayu terbentuk sebagai bekal penting kelak mengantarkan dirinya berhasil masuk sebagai Anggota DPRD Malang dan Anggota DPR RI.

Sampailah untuk pertama kalinya tahun 1999, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengambil keputusan untuk masuk di Legislatif. Tidak sia-sia, keputusan beraninya membuahkan hasil masuk sebagai Anggota Parlemen khususnya DPRD Kota Malang. Bahkan, langsung ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kota Malang periode 1999-2004 kala itu usianya masih 39 tahun. Kemudian sebagai Anggota DPR RI 2019-2014.

— pun/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya



Setjen DPR RI Terima *Digital Government Award*

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima penghargaan *Digital Government Award* dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 sebagai Penerapan SPBE Terbaik kategori Lembaga Pemerintahan. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara.

“Saya kira ini adalah salah satu penghargaan yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR itu sudah pada jalur yang benar dan kedepan harus lebih baik lagi. Tadi Bapak Presiden juga berpesan, *enggak* boleh ada lagi aplikasi yang terlalu banyak, yang penting aplikasi itu bisa memudahkan publik atau masyarakat untuk dapat bisa mengakses,” ujar Indra kepada **Parlementaria** se usai menerima penghargaan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jakarta, pada Senin (27/5).

Terkait dengan akses publik, saat



Sekjen DPR RI Indra Iskandar mewakili Sekretariat Jenderal DPR RI usai menerima penghargaan Digital Government Award dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 sebagai Penerapan SPBE Terbaik kategori Lembaga Pemerintahan, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jakarta, pada Senin (27/05/2024).

ini Setjen DPR RI juga tengah melakukan redesign terhadap pengelolaan situsny. Hal ini dilakukan sebagai

salah satu bentuk komitmen dari Setjen DPR RI untuk meningkatkan pelayanan informasi terutama bagi masyarakat untuk dapat mengakses produk-produk hukum seperti perundang-undangan dan kinerja DPR RI lainnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggaran maupun fungsi diplomasi parlemen.

Selain memberikan penghargaan, dalam acara SPBE Summit 2024 ini juga Presiden meluncurkan *Government Technology* (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital mulai dioperasikan pada September-Oktober 2024 mendatang. Aplikasi ini merupakan bentuk pelayanan publik dari berbagai instansi yang diintegrasikan menjadi satu. [gal/rdn](https://gal.rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



SAYA KIRA INI ADALAH SALAH SATU PENGHARGAAN YANG MENJELASKAN BAHWA APA YANG DILAKUKAN OLEH SEKRETARIAT JENDERAL DPR ITU SUDAH PADA JALUR YANG BENAR DAN KEDEPAN HARUS LEBIH BAIK LAGI. TADI BAPAK PRESIDEN JUGA BERPELAN, ENGGAK BOLEH ADA LAGI APLIKASI YANG TERLALU BANYAK, YANG PENTING APLIKASI ITU BISA MEMUDAHKAN PUBLIK ATAU MASYARAKAT UNTUK DAPAT BISA MENGAKSES.

Indra Iskandar

Sekjen DPR RI

Seminar Nasional Bulan Kesadaran Auditor

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema *'Transforming Audit Culture: Leadership, Ethics, And Professionalism'*. Seminar nasional tersebut dalam rangka memperingati bulan kesadaran profesi auditor internal yang diperingati setiap tahun pada bulan Mei oleh para kepala auditor yang bertindak sebagai penasihat terpercaya di lembaga atau di organisasi manapun.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menilai peringatan ini bertujuan untuk memantau fungsi internal, meninjau pedoman kepatuhan, dan memastikan kepatuhan dalam menilai resiko yang mungkin terjadi. "Sehingga kita semua harus sama-sama meyakini dan berkomitmen bahwa apa yang dikerjakan oleh Inspektorat Utama



FOTO: ENO/PDI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar saat foto bersama usai menghadiri Seminar Nasional di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5/2024).

selaku auditor terhadap kegiatan DPR adalah bagian dari kewajiban moral kita semua untuk menjaga," ujar Indra Iskandar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV DPR RI,

Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).

Sebelumnya saat sambutan, Indra mengungkapkan pertukaran pengalaman antara profesional menjadi bagian penting dalam menginspirasi inovasi dan pembaruan praktek audit. Bulan kesadaran tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghormatan terhadap kontribusi auditor internal, tetapi juga sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi profesi auditor dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

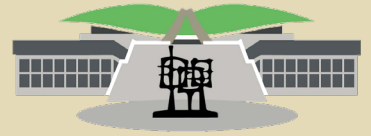
Senada, Plh. Inspektor Utama Setjen DPR Furcony Putri Syakura saat pidato laporan kegiatan mewakili Inspektor Utama Setjen DPR RI Nana Sudjana mengungkapkan Seminar Nasional yang digelar oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI dalam rangka memperingati bulan kesadaran profesi auditor internal untuk meningkatkan dan memberikan penghargaan betapa penting peran profesi auditor internal dalam suatu organisasi.

pun/rdn



Scan QR untuk berita selengkapnya





**Korpri Setjen DPR RI bersama Keluarga Sehat Donor Darah (KSDD) dan PMI DKI Jakarta menggelar donor darah rutin bagi pegawai yang beraktivitas di lingkungan Kompleks Parlemen Bertempat di Gedung Nusantara, Rabu (29/5/2024).
FOTO :FHN/PDT**

